



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TASIKMALAYA

Jalan Letnan Harun - Kota Tasikmalaya
Telepon (0265) 346144, Faksimili (0265) 346430

Kanal : imigrasitasikmalaya.com E-mail : kanim.tasik@kemenkumham.go.id

Nomor : W.11.IMI.IMI.6-PR.03-32
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2020

4 Januari 2021

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
di –
Bandung

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat nomor W.11-UM.01.01-9729 tanggal 22 Desember 2020 hal Permintaan LKIP dan Laporan Tahunan 2020 Unit Pelaksana Teknis, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

Isman Jayadi

NIP. 19640629 198503 1 002



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2020



KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TASIKMALAYA

KATA PENGANTAR

Pembuatan dan penyusunan Laporan Kinerja/Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya merupakan ikhtiar jajaran untuk senantiasa memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020. Hal ini sebagai upaya memberikan jawaban atas sejauh mana jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Selanjutnya pada tahun 2020 ini kami berharap bahwa kinerja seluruh jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya, dapat termonitor dan terpantau dengan baik dan komprehensif, sehingga akan berkontribusi positif pada pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM dan memberikan kepastian dan pengendalian keserasian pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian. Selain itu pula, laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja khususnya di jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya pada tahun 2020.

Sebagai penutup, semoga apa yang ada dalam Laporan Kinerja/ Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 ini kiranya dapat memberi manfaat dan sumbangsih dalam upaya memberikan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain itu mampu memberikan gambaran dan pertimbangan keberlanjutan bagi capaian kinerja pada tahun berikutnya, mencapai Visi Masyarakat memperoleh kepastian hukum dan menuju Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia yang berkinerja baik dan berintegritas dengan sistem nilai kami "PASTI". Mari kita gelorakan semangat pengabdian, kita tingkatkan kinerja lebih keras, lebih keras, dan lebih keras lagi. Tumbuhkan semangat kerja Nyata, kerja PASTI (one team, one vision, one goal), dan kami PASTI, pasti profesional, pasti akuntabel, pasti sinergi, pasti transparan dan pasti inovatif. Akhirnya demikian laporan ini kami susun, semoga mampu

memberikan kemanfaatan terbaik bagi organisasi tercinta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Tasikmalaya, 4 Januari 2021
Kepala Kantor,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Isman Jayadi', written over the printed name.

ISMAN JAYADI
NIP. 19640629 198503 1 002



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan roda pemerintahan, baik pusat dan daerah wajib hukumnya selalu menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, efektifitas serta senantiasa melakukan penegakan supremasi hukum. Selain hal tersebut, penting pula adanya komitmen dan keinginan kuat para penyelenggaranya untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Perwujudan akan nilai-nilai ideal tersebut tentu akan berkorelasi positif terhadap pencapaian visi misi dan tujuan organisasi, serta secara umum mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara dalam konsep nawa cita yang menjadi arah dan kebijakan pembangunan nasional.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya tahun 2020 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya dalam menjalankan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya untuk membantu pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Hukum dan HAM atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya untuk meningkatkankinerjanya berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya yang sesuai dalam penggunaan anggaran tahun 2020.

B. Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya

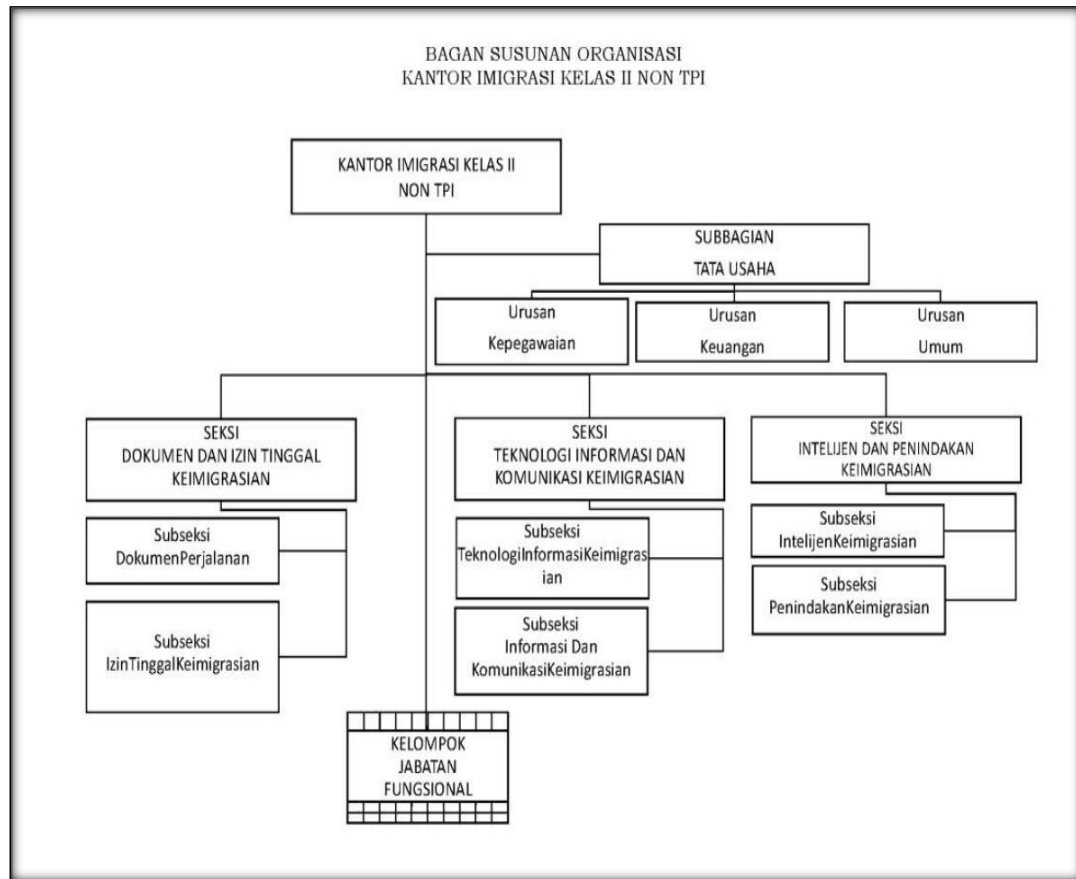
Sebagai unit yang berperan dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya

FUNGSI :

- a. penyusunan rencana keimigrasian di bidang keimigrasian;
- b. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
- c. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
- d. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
- e. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
- f. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
- g. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- h. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
- i. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, brang milik negara, dan rumah tangga; dan
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas keimigrasian.

C. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya



Tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya dilaksanakan oleh 3 (tiga) seksi dan 1 (satu) subbagian, sebagaimana tampak pada Tabel :

ORGANISASI	TUGAS	FUNGSI
1 Subbagian Tata Usaha	Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia,	a. Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan; b. Pelaksanaan dan pengendalian internal; c. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan

		<p>administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.</p>	<p>d. Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.</p>
2	<p>Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian</p>	<p>Melakukan pelayanan dokumen perjalanan, izin tinggal, dan status keimigrasian</p>	<p>a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan di bidang dokumen dan izin tinggal keimigrasian; b. Pelayanan paspor; c. Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing; d. Pelayanan izin tinggal; e. Pemeriksaan, penelaahan dan penyelesaian alis status keimigrasian; f. Pelayanan izin masuk kembali; g. Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam</p>

			<p>rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;</p> <p>h. Pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan</p> <p>i. Pelayanan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.</p>
3	Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan system teknologi informasi dan komunikasi	<p>a. Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang gpemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi keimigrasian;</p> <p>b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;</p> <p>c. Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;</p> <p>d. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan</p> <p>e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.</p>
4	Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Melakukan penyiapan pelaksanaan intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian	<p>a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;</p> <p>b. Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;</p>

			<ul style="list-style-type: none"> c. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian; d. Penyajian informasi produk intelijen; e. Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian; f. Penyidikan tindak administratif keimigrasian; dan g. Pelaksanaan pemulangan orang asing.
--	--	--	---

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya didukung oleh sumber daya manusia sebanyak **44 orang**, sebagaimana terdapat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 1

BERDASARKAN GENDER	
Laki – Laki	Perempuan
36 orang	8 orang

PERENCANAAN KINERJA

A. Uraian Singkat Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra–KL) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan bersifat indikatif. Renstra merupakan platform Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM atas pelaksanaan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya merupakan Instansi vertikal sebagai pelaksana program dan tugas-tugas serta kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di daerah. Sebagian kegiatannya berupa Pelayanan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari Unit Imigrasi serta kegiatan Administrasi di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 - 2019 telah dirumuskan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi, yakni:

Visi :

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Misi :

- a. Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;

- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

Dan nilai Kementerian "PASTI" yakni; Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan Inovatif.

Relevan dengan visi dan misi dimaksud, sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM sebagai penjabaran Visi dan Misi serta nilai PASTI tersebut, tentu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya sebagai garda terdepan pencapaian sasaran strategis kementerian.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, serta merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya Tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut :

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penyelenggaraan penegakan hukum keimigrasian	Jumlah penyelenggaraan penegakan Hukum Keimigrasian	29
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	41.764
3	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker	1
4	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	1

Untuk terwujudnya Sasaran Program Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan target yang telah ditetapkan, ada beberapa Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran program dimaksud. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik, terarah dan terencana jika dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan dan sinergis oleh 3 (tiga) Seksi dan 1 (satu) Subbagian yang ada dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya sesuai dengan Tata Nilai Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif (“PASTI”).

Adapun sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan tersebut adalah :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	Meningkatnya Penyelenggaraan penegakan hukum keimigrasian	29 LHK	559.450.000
Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	41764 Dok	949.020.000
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	698.823.000
Layanan Perkantoran	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	1 Layanan	4.274.555.000
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	507.809.000

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas pada tingkat perencanaan kebijakan (tingkat Kabinet/Pemerintah), memuat indikator kinerja yaitu: (1) Impact untuk menilai sasaran pokok yang merupakan kinerja dari prioritas; (2) Outcome untuk menilai fokus prioritas yang merupakan kinerja dari fokus prioritas, (3) Output untuk menilai kegiatan prioritas yang merupakan kinerja dari kegiatan prioritas; dan (4) Outcome, fokus prioritas merupakan kinerja hasil yang harus dicapai oleh satu atau beberapa K/L yang terkait dengan pencapaian kinerja prioritas. Akuntabilitas pada tingkat organisasi Kementerian/Lembaga, memuat indikator kinerja yaitu: (1) Impact untuk menilai misi atau sasaran Kementerian/Lembaga yang merupakan kinerja yang ingin dicapai Kementerian/Lembaga ; (2) Outcome untuk menilai kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Kementerian/Lembaga setingkat Eselon 1A; (3) Output untuk menilai kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Kementerian/Lembaga setingkat Eselon 2; dan (4) Pencapaian misi atau sasaran Kementerian/Lembaga (impact) dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program-program (outcome) yang ada di dalam Kementerian/Lembaga, dan pencapaian kinerja program (outcome) dipengaruhi oleh pencapaian dari kinerja kegiatan-kegiatannya (output).

Target indikator kinerja disusun setelah indikator kinerja ditetapkan. Target indikator kinerja menunjukkan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kementerian/Lembaga, program, dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

SASARAN PROGRAM

Ada 4 (empat) sasaran program yang diemban oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya, yaitu :

1. Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian;
2. Meningkatnya pelayanan keimigrasian;
3. Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker; dan
4. Terselenggaranya Layanan Perkantoran.

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penyelenggaraan penegakan hukum keimigrasian	Jumlah penyelenggaraan penegakan Hukum Keimigrasian	29
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	41.764
3	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker	1
4	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	1

MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN

Pencapaian Sasaran Program Meningkatnya penyelenggaraan penegakan hukum keimigrasian didukung oleh indikator kinerja, yaitu:

1. Jumlah penyelenggaraan penegakan Hukum Keimigrasian

Dalam mendukung meningkatnya penegakan hukum keimigrasian dalam indikator jumlah penyelenggaraan penegakan hukum keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya melakukan pemberian tindakan administratif keimigrasian oleh seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, pro justisi, penyidikan, serta deportasi. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Target indikator kinerja jumlah penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan adalah 8 LHK;
- b. Pro justisi sebanyak 1 LHK;
- c. Penyidikan sebanyak 7 LHK;
- d. Deportasi sebanyak 4 LHK.

Adapun capaian sasaran indikator kinerja yang menjadi pendukung tercapainya sasaran program yang diemban oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya pada tahun 2020 ini terealisasi sebesar **68.97 %** dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \text{Realisasi/target} \times 100\% \\
 &= 20 \text{ orang} / 29 \text{ orang} \times 100\% \\
 &= 68.97 \%
 \end{aligned}$$

Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020 :

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Jumlah penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan	10	29	26	20	260%	68.97 %

Penyebab dari melebihinya target jumlah penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan dikarenakan banyaknya laporan dari masyarakat tentang keberadaan orang asing dan bentuk koordinasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya dengan instansi terkait serta dengan diadakannya operasi mandiri dan operasi gabungan.

Terjadi penurunan dalam pencapaian target tahun 2020 (capaian sebesar 68,97%) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (260%) dikarenakan terjadinya pandemi covid-19.

MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN

Pencapaian Sasaran Program Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan keimigrasian, didukung oleh capaian indikator yaitu :

1. Jumlah penyelenggaraan pelayanan keimigrasian

Dalam mendukung meningkatnya pelayanan keimigrasian dalam indikator jumlah pelayanan keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya melaksanakan kegiatan pelayanan antara lain :

1. Pelayanan Paspur umum (online);
2. Pelayanan *eazy passport*;
3. Pelayanan Paspur Simpatik;
4. Pelayanan Paspur Haji 2020; serta
5. Pelayanan Izin tinggal keimigrasian.

Target indikator kinerja jumlah pelayanan keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan tahun 2020 adalah 41.764 Dokumen.

Adapun capaian sasaran indikator kinerja yang menjadi pendukung tercapainya sasaran program yang diemban oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya pada tahun 2020 ini terealisasi sebesar **42.78 %** dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \text{Realisasi/target} \times 100\% \\ &= 17.866 \text{ dokumen}/41.764 \text{ dokumen} \times 100\% \\ &= 42.78\%\end{aligned}$$

Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020 :

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Jumlah pelayanan keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	50.500	41,764	45.162	17.866	89,43 %	48,78%

Penyebab tidak tercapainya Target Jumlah pelayanan keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebesar 41.764 dokumen dikarenakan sebagai berikut :

1. Pelayanan paspor serta izin tinggal mengalami penurunan yang sangat drastis dikarenakan terjadi pandemic covid-19;
2. Sudah tidak dilaksanakannya pelayanan paspor haji;
3. Kurangnya pemohon WNA yang berkerja atau yang tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya.

Tingginya Target Jumlah pelayanan keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan membuat pencapaian target tersebut semakin berat. Terjadi penurunan dalam pencapaian target tahun 2020 (capaian sebesar 42.78 %) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (**89,43 %**).

TERSELENGGARANYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER

Pencapaian Sasaran Program terselenggaranya layanan dukungan manajemen satker didukung oleh indikator kinerja, yaitu:

1. Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker

Dalam mendukung terselenggaranya layanan dukungan manajemen satker dalam indikator terselenggaranya layanan dukungan manajemen satker, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya melaksanakan kegiatan pelayanan dukungan manajemen satker antara lain :

1. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran;
2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi;
3. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan;
4. Pengelolaan Kepegawaian;
5. Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan.

Target indikator kinerja terselenggaranya layanan dukungan manajemen satker yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan tahun 2020 adalah 1 layanan yang mencakup 5 kegiatan.

Adapun capaian sasaran indikator kinerja yang menjadi pendukung tercapainya sasaran program yang diemban oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya pada tahun 2020 ini terealisasi sebesar **100 %** dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \text{Realisasi/target} \times 100\% \\
 &= 1 \text{ layanan} / 1 \text{ layanan} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020 :

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Terselenggaranya layanan dukungan manajemen satker	-	1	-	1	-	100%

Capaian sasaran program terselenggaranya layanan dukungan manajemen satker tidak ada pada perjanjian kinerja 2019, jadi tidak ada perbandingan pencapaian target tersebut.

TERSELENGGARANYA LAYANAN PERKANTORAN

Pencapaian Sasaran Program terselenggaranya layanan perkantoran didukung oleh indikator kinerja, yaitu:

1. Terselenggaranya layanan perkantoran

Dalam mendukung terselenggaranya layanan perkantoran dalam indikator terselenggaranya layanan perkantoran, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya melaksanakan kegiatan layanan perkantoran antara lain :

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai;
2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

Target indikator kinerja terselenggaranya layanan dukungan manajemen satker yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan tahun 2020 adalah 1 layanan yang mencakup 2 kegiatan.

Adapun capaian sasaran indikator kinerja yang menjadi pendukung tercapainya sasaran program yang diemban oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya pada tahun 2020 ini terealisasi sebesar **100 %** dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \text{Realisasi/target} \times 100\% \\ &= 1 \text{ layanan} / 1 \text{ layanan} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020 :

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Terselenggaranya layanan dukungan manajemen satker	-	1	-	1	-	100%

Capaian sasaran program terselenggaranya layanan dukungan manajemen satker tidak ada pada perjanjian kinerja 2019, jadi tidak ada perbandingan pencapaian target tersebut.

CAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN

Dalam mendukung tercapainya indikator kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya, dilaksanakan beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam rencana kerja dan RKAKL 2020. Realisasi indikator kegiatan tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai terwujudnya Sasaran Program dimaksud, dibutuhkan beberapa indikator kinerja kegiatan yaitu :

- Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian;
- Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian;
- Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal;
- Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker;
- Terselenggaranya Layanan Perkantoran.

SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Sasaran Kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya untuk mendukung tercapainya Program yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ada 5 (lima) Sasaran Kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian;
2. Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian;
3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal;
4. Layanan Dukungan Manajemen Satker;
5. Layanan Perkantoran.

Dari ke-5 (lima) sasaran kegiatan dimaksud, ada beberapa Indikator Kinerja dengan penjabaran sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian;	Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian;	29 LHK
Penyelenggaraan pelayanan keimigrasian	Meningkatnya Penyelenggaraan pelayanan keimigrasian	41764 Dok
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
Layanan Perkantoran	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	1 Layanan

Untuk terwujudnya Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM, Sasaran Kegiatan yang ada dicapai dengan beberapa Indikator Kinerja Kegiatan dan Target dari 3 (tiga) Seksi dan 1 (satu) Subbagian di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

Sasaran Kegiatan :

Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian;

Indikator Kegiatan :

Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian

KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI
Koordinasi Tim Pora <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan materi tim pora priangan timur Koordinasi dan Pembahasan Tim Pora 	LAPORAN KEGIATAN	29 LHK	20 LHK
Tindakan Administratif Keimigrasian			

<ul style="list-style-type: none"> • Pendetensian • Pendeportasian 			
Penyelidikan Intelijen Keimigrasian Wilayah Barat <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Pengumpulan data dan informasi • Pengolahan data dan informasi • Penyajian Laporan 			
Operasi Mandiri Wilayah Barat <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan Rencana Kegiatan • Pelaksanaan Pengawasan • Penyusunan Laporan dan Evaluasi 			
Operasi Gabungan Wilayah Barat <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan Rencana Kegiatan • Pelaksanaan Pengawasan • Penyusunan Laporan dan Evaluasi 			
Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Barat <ul style="list-style-type: none"> • Penyelidikan • Penyidikan 			
CAPAIAN KINERJA		29	20

Analisis Capaian :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang pengawasan keimigrasian, realisasi target capaian kinerja masih belum mencapai target yang ditetapkan, dikarenakan kurangnya SDM yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan luasnya cakupan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya, jumlah anggaran yang masih belum maksimal serta adanya pandemi covid-19. Target yang harus dicapai pada Tahun 2020 adalah **29 LHK**, sedangkan realisasinya sebanyak **20 LHK** dan diperoleh perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{20}{29} \times 100\% = 68,97\%$$

Sasaran Kegiatan :
Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian

Indikator Kegiatan :
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian

KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI
Penerbitan Dokumen Keimigrasian RI di Kantor Imigrasi	Dokumen	41.764	17.866
CAPAIAN KINERJA		41.764	17.866

Analisis Capaian :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, realisasi Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian RI di Kantor Imigrasi dapat dilihat berdasarkan penjelasan diatas dengan melakukan penghitungan target yang harus dicapai berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, target yang harus dicapai adalah **41.764 Dokumen**, sedangkan realisasi nya sebanyak **17.866 Dokumen** dan diperoleh perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{17866}{41764} \times 100\% = 42,78\%$$

Penyebab tidak tercapainya Target Jumlah pelayanan keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebesar 41.764 dokumen dikarenakan sebagai berikut :

1. Pelayanan paspor serta izin tinggal mengalami penurunan yang sangat drastis dikarenakan terjadi pandemi covid-19;
2. Sudah tidak dilaksanakannya pelayanan paspor haji;

3. Kurangnya pemohon WNA yang berkerja atau yang tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya.

Sasaran Kegiatan :
Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Indikator Kegiatan :
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Internal

KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI
Layanan Sarana dan Prasarana 1. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (pembelian mesin antrian) 2. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran (pembelian lemari besi) 3. Pengadaan kendaraan bermotor (pembelian mobil)	Layanan	1	1
CAPAIAN KINERJA		1	1

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, realisasi Layanan sarana dan prasarana internal dapat dilihat berdasarkan penjelasan diatas dengan melakukan penghitungan target yang harus dicapai berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, target yang harus dicapai adalah 1 **layanan**, sedangkan realisasi nya sebanyak 1 **layanan** dan diperoleh perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Sasaran Kegiatan :
Layanan Dukungan Manajemen Satker

Indikator Kegiatan :
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker

KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI
Layanan Dukungan Manajemen Satker <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran• Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi• Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan• Pengelolaan Kepegawaian• Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah tangga dan perlengkapan	Layanan	1	1
CAPAIAN KINERJA		1	1

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, realisasi Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker dapat dilihat berdasarkan penjelasan diatas dengan melakukan penghitungan target yang harus dicapai berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, target yang harus dicapai adalah 1 **layanan**, sedangkan realisasi nya sebanyak 1 **layanan** dan diperoleh perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Sasaran Kegiatan :
Layanan Perkantoran

Indikator Kegiatan :
Terselenggaranya Layanan Perkantoran

KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI
Layanan Perkantoran	Layanan	1	1
CAPAIAN KINERJA		1	1

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, realisasi Jumlah Layanan Perkantoran dapat dilihat berdasarkan penjelasan diatas dengan melakukan penghitungan target yang harus dicapai berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, target yang harus dicapai adalah 1 **layanan**, sedangkan realisasi nya sebanyak 1 **layanan** dan diperoleh perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

PENGAYOMAN

REALISASI ANGGARAN

No	Program/Kegiatan/Output	Pagu 2020	Realisasi	%
1	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	559.540.000	179.451.000	32.07
2	Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	949.020.000	543.703.810	57.29
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	507.809.000	507.481.000	99.94
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	689.823.000	375.972.333	54.50
5	Layanan Perkantoran	4.274.555.000	4.246.128.205	99.33
TOTAL		6.980.747.000	5.852.736.348	83.84



PERBANDINGAN PENYERAPAN ANGGARAN 2019 DAN 2020

No	Program/Kegiatan/Output	Realisasi 2019	%
1	Pengawasan Keimigrasian	229.136.000	89.55
2	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing	19.292.000	58.08
3	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI	335.417.000	99.75
4	Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	254.608.000	98.76
5	Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian	75.472.000	83.84
6	Penyelidikan Keimigrasian	7.320.000	0
7	Layanan Dukungan Manajemen Satker	510.305.000	75.42
8	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	302.704.000	99.99
9	Layanan Perkantoran	4.078.558.000	100.68
Total		5.198.003.000	97.36

No	Program/Kegiatan/Output	Realisasi 2020	%
1	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	179.451.000	32.07
2	Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	543.703.810	57.29
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	507.481.000	99.94
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	375.972.333	54.50
5	Layanan Perkantoran	4.246.128.205	99.33
TOTAL		5.852.736.348	83.84

Analisis Capaian :

Pada tabel diatas terlihat persentase penyerapan anggaran di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar : $\frac{97,36\%}{83,84\%} = 1,16$

Untuk penyerapan tahun 2020 realisasinya kecil, dikarenakan ada pengurangan anggaran dampak dari pandemic covid-19.

PENUTUP

A. Permasalahan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya sudah berusaha memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Secara ringkas seluruh capaian kinerja di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Pencapaian kinerja pada program-program tersebut di atas menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian masih ada juga beberapa kegiatan pada program-program tersebut yang belum mencapai hasil sesuai yang diharapkan karena ada beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Pelayanan paspor serta izin tinggal mengalami penurunan yang sangat drastis dikarenakan terjadi pandemi covid-19;
2. Sudah tidak dilaksanakannya pelayanan paspor haji;
3. Kurangnya pemohon WNA yang berkerja atau yang tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya;
4. Masih minimnya SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya.

B. Langkah – langkah kedepan

Upaya pemecahan masalah atau kendala senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya.dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang memerlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu penambahan pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya.

2. Untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai perlu adanya reward sehingga terciptanya persaingan yang sehat diantara pegawai dalam melahirkan inovasi – inovasi rencana tindak lanjut serta perubahan yang dilakukan;
3. Melakukan Koordinasi antar seksi dalam penguatan pelayanan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya.
4. Untuk lebih meningkatkan pelayanan paspor di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya.

